1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, Pasal 3), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan harus mampu menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan profesional. Dalam hal ini, kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan sistematis terhadap seluruh komponen pendidikan seperti peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh kinerja guru yang profesional dan bermutu (berkualitas). Djojonegoro dalam Sudarwan (2002: 39) mengemukakan bahwa, “guru yang bermutu dalam tingkatan teori merupakan mereka yang memiliki kemampuan profesional sebagai pendidik, dengan empat faktor utama yaitu kemampuan profesional, upaya profesional, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, dan kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaan”.

Kota Metro memiliki visi sebagai Kota Pendidikan yang unggul dan masyarakatnya sejahtera serta didukung pula oleh misinya yaitu membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Untuk menunjang visi Kota Metro tersebut tidak terlepas dari pentingnya peran guru sehingga perlu upaya untuk meningkatkan mutu (kualitas) guru di mana guru harus bisa menjadi pendidik yang profesional, selalu mengikuti perkembangan dan mampu mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk disampaikan ke peserta didik selain mengajar sesuai dengan kurikulum, agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dan kinerja guru adalah melaksanakan sertifikasi guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Secara konseptual undang-

undang tersebut telah memberikan penjabaran tentang kualifikasi dan kompetensi guru secara umum, bahwa guru minimal berkualifikasi sarjana (S1) atau diploma (D4), dan setiap guru secara ideal harus memiliki kompetensi dan sertifikasi profesi. Namun program ini juga tidak akan mencapai tujuannya jika para guru itu sendiri kurang memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan.

Amtu (2013:263) beranggapan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu memberikan dampak bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang menjadi sasaran kebijakan itu dalam kurun waktu tertentu. Dengan diberlakukannya sertifikasi bagi kalangan pendidik khususnya guru, maka keinginan dan harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan dipastikan akan semakin membaik. Bagi tenaga pendidik yang telah disertifikasi, maka tuntutan untuk mengembangkan profesionalisasi adalah suatu keharusan, karena pengakuan yang diberikan disertai dengan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan yang juga semakin meningkat. Antara hak dan kewajiban seorang guru terletak tanggung jawab yang besar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang bermutu dan bermartabat. Oleh karena itu, banyak pihak menaruh harapan besar terhadap guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan sertifikasi guru belum menunjukkan hasil yang maksimal. Menurut Politisi PKS (Partai Keadilan Sosial) Nasriyanto Effendi selaku Komisi III DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Metro, kinerja guru sertifikasi dinilai belum memiliki tanggung jawab lebih dibanding guru lainnya yang tidak bersertifikasi karena belum terlihat adanya peningkatan prestasi di sekolah yang signifikan. Nasriyanto menganggap bahwa,

“Semestinya semakin banyak guru yang bersertifikasi berkorelasi dengan peningkatan prestasi siswa”. Namun ternyata masih belum terlihat perubahan yang tampak, sementara di Kota Metro guru yang bersertifikasi jumlahnya terus bertambah. (Sumber: <http://lampost.co/berita.komisi.ii.dprd.metro.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2014, pukul 15.32 WIB).

Berkaitan dengan hal tersebut, Nasriyanto juga mengungkapkan bahwa sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran yang cukup besar, dengan tenaga guru yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bersertifikasi belum mempunyai hasil maksimal, bahkan cenderung kalah semangat dan hasilnya secara kualitas masih di bawah swasta, padahal sekolah swasta di Kota Metro hampir semua serba minim baik anggaran maupun infrastrukturnya. (Sumber: <http://detiklampung.com/berita-di-kotametro-swasta-lebih-berkualitas-ketimbang-negeri.html>, diakses pada 10 Februari 2015, pukul 15.30 WIB).

Berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 1 April 2015 dengan Ibu Gusnety selaku guru adaptif SMK Negeri 1 dan informasi dari Bapak Sutarman selaku kepala sekolah SMK Negeri 2 Metro menyebutkan bahwa banyak guru yang kurang termotivasi serta kesadaran dan kesediaan guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya masih rendah. Seorang guru hanya menganggap pekerjaan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sehari-hari bukan untuk prioritas kemajuan pendidikan, seperti ada yang tidak tepat waktu saat masuk kantor, menunda tugas mengajar di ruang kelas, terlalu menganggap enteng dengan peraturan yang ada sehingga masih ada sebagian guru yang meninggalkan tugas

pada jam pelajaran tanpa keterangan yang sah, serta guru belum melakukan evaluasi pembelajaran secara objektif dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan kebijakan sertifikasi itu sendiri, menurut pengakuan informan Ibu Agustina, S.Kom menyatakan bahwa adanya sertifikasi guru atau tunjangan kesejahteraan guru tidak banyak menghasilkan dampak pada kinerja guru. Manfaat sertifikasi guru hanya terletak pada penerimaan tunjangannya dan tidak sedikit pula keluhan dari guru-guru dalam mendapatkan sertifikat pendidik dengan memperoleh tunjangan kesejahteraan, di mana tunjangan yang diterima tidak semata-mata dapat diperoleh dengan mudah dan tanpa hambatan. Karena para guru harus disibukkan dengan berbagai persyaratan administrasi sertifikasi, pemberkasan dan pelatihan sehingga meyebabkan jam belajar mengajar di kelas terganggu. Dalam pemberian tunjangan juga tidak jarang diberikan secara tepat waktu, tetapi pencairan dana tunjangan sertifikasi sering dibayarkan terlambat. Sehingga membuat para guru menunggu dan merasa kecewa terkait seringnya keterlamabtan pencairan tunjangan tersebut.

Dari berbagai pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya terkait kinerja guru, pada awalnya kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan program sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja. Hal tersebut dipertegas oleh Muslich (2007:8) yang menyatakan bahwa rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, maka diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) juga bagus, KBM yang bagus diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu. Sehingga, untuk memotivasi para guru agar menjadi lebih profesional

pemerintah sangat serius dalam memberikan apresiasi kepada para guru dengan mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru tersebut.

Namun, sertifikasi atau tunjangan professional yang mengalir sejak tahun 2007 dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ini, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai bentuk permasalahan terkait kinerja guru pasca program sertifikasi. Untuk itu, sangat diperlukan adanya evaluasi kinerja guru bersertifikasi guna memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang diharapkan dapat membawa perubahan menuju ke arah yang diinginkan yaitu perbaikan mutu pendidikan dan mutu kualitas guru. Evaluasi tersebut dipandang penting untuk mengetahui sejauh mana hasil dan dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kinerja guru.

Dengan melihat adanya masalah-masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kinerja Guru Pasca Program Sertifikasi Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Metro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka peneliti berusaha merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil Kinerja Guru Pasca Program Sertifikasi Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Metro?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mendapatkan hasil penilaian kinerja guru pasca program sertifikasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Metro sebagai upaya peningkatan kinerja guru dalam program tersebut.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian “Evaluasi Kinerja Guru Pasca Program Sertifikasi Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Metro” yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Negara tentang evaluasi kinerja khususnya kinerja pegawai atau guru mengenai kebijakan sertifikasi guru.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan berguna sebagai acuan atau bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam perbaikan dan penyempurnaan kebijakan sertifikasi guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kinerja guru.
3. Sebagai salah satu bahan acuan untuk referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah serupa